

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam melaksanakan pembangunan serta pemerataan pendapatan di Indonesia. Salah satu bantuan terbaru dari Jepang kepada Indonesia adalah bantuan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dalam membangun Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) di enam titik pulau terluar Indonesia. Enam pulau terluar tersebut ialah Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaki, Moa, dan Biak. Bantuan ini merupakan bentuk bantuan dana hibah dan kerja sama teknik, yang mana Indonesia tidak diharuskan untuk mengembalikan dana bantuan dari Jepang tersebut. Bantuan ini sudah berlangsung sejak 2018, namun untuk proses pembangunan SKPT tersebut sempat terhambat karena adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga 2021 (Jelita, 2022). Berbagai pembangunan yang menggunakan bantuan hibah dari Jepang harus berdasarkan persetujuan dari JICA dan JICA Consultant. Sehingga pembangunan SKPT tersebut menjadi terhambat karena perwakilan dari JICA tidak dapat datang langsung ke lokasi pembangunan karena adanya Pandemi Covid-19 (Muhammad, 2022).

Pemerintah Indonesia mengharapkan adanya pemerataan pendapatan dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sentra Kelautan dan Perikanan

Terpadu (SKPT) dibangun untuk menciptakan pemerataan yang ada di Indonesia. Pembangunan SKPT nantinya akan meliputi pembangunan pelabuhan serta berbagai fasilitas yang ditujukan kepada para nelayan berskala kecil seperti fasilitas *cold storage*, fasilitas produksi es, serta pasar ikan yang nantinya dapat dijadikan para nelayan di pulau-pulau tersebut untuk melakukan kegiatan ekspor impor (Fajar, 2018a). Baik Indonesia maupun Jepang berencana untuk mendorong kesejahteraan para nelayan di titik terluar Indonesia, sehingga terciptanya kerja sama pembangunan di beberapa pulau yang cukup jarang tersentuh oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa bantuan ini merupakan sebuah kerja sama dalam bidang ekonomi, bukanlah sebuah usaha Jepang untuk mengeksploitasi keanekaragaman Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Negara merupakan aktor rasional, hal ini memiliki arti bahwa negara mempertimbangkan untung dan rugi dalam mengambil tindakan. Adanya fakta tersebut menimbulkan kejanggalan atas bantuan luar negeri Jepang dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Indonesia.

Bantuan Jepang dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam pulau terluar Indonesia ini merupakan bantuan luar negeri yang berbentuk hibah. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menyampaikan bahwa Jepang memberikan bantuan ini kepada Indonesia tanpa mengharapkan imbalan, serta berharap melalui hibah ini dapat mendukung pembangunan fisik SKPT sampai selesai (Morotai, 2021). Sebagai aktor rasional dapat dikatakan bahwa Jepang memiliki motif lain dalam rangka memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan

Perikanan untuk membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang ini berjumlah 5,5 miliar Yen atau setara dengan Rp 704,6 miliar. Dana tersebut dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama yang diberikan Jepang yaitu berjumlah 2,5 miliar Yen atau setara dengan Rp 324 miliar pada tahun 2018, sedangkan untuk tahap kedua akan dikirimkan oleh Jepang yang berjumlah 3 miliar Yen pada tahun 2021 (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021b).

Penandatanganan kerja sama Jepang dan Indonesia dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pada 31 Juli 2018 untuk tahap pertama (Pregiwati, 2018).¹ Sedangkan untuk tahap kedua naskah perjanjian kedua negara tersebut disahkan pada 2 Februari 2021 (JICA, 2021).² Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini tertera di dalam Nawa Cita ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” (Pregiwati, 2019). Sesuai dengan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan. Tindakan tersebut dimulai dengan melakukan berbagai pembangunan di wilayah-

¹ Indonesia diwakilkan oleh Nilanto Perbowo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Jepang diwakilkan oleh Perwakilan JICA untuk Indonesia yaitu Shinichi Yamanaka.

² Indonesia diwakilkan oleh Drs. Antam Novambar, S. H., M. Hum., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Jepang diwakilkan oleh Kepala Kantor Perwakilan JICA di Indonesia yaitu Ogawa Shigenori.

wilayah terluar Indonesia terlebih pada area perairan yang memiliki berbagai potensial di dalamnya. Keuntungan pembangunan SKPT ini dirangkai untuk dapat dinikmati oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sekitar. Berbagai sarana dan prasarana untuk para nelayan menjadi agenda dalam pembangunan SKPT. Bahkan pembangunan SKPT ini juga melibatkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia cukup percaya diri dengan adanya pembanguan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dapat menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia (Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017).

Menurut pemikiran realis, negara merupakan aktor dominan di dalam politik internasional serta cenderung mementingkan kepentingan nasionalnya (Rosyidin, 2020b). Fakta tersebut mengantarkan pada fenomena bantuan luar negeri Jepang terhadap pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa pulau terluar Indonesia. Jepang memberikan bantuan tersebut dalam bentuk hibah, bantuan hibah tersebut memiliki arti bahwa Indonesia tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut.

Negara merupakan aktor rasional, yang cenderung mempertimbangkan untung dan rugi dari sebuah tindakan (Rosyidin, 2022). Dana hibah Jepang ke Indonesia menimbulkan berbagai kejanggalan, jika dilihat dari perspektif realisme. Tindakan Jepang tersebut menyimpan berbagai kepentingan nasional Jepang. Adanya berbagai kepentingan politik serta ekonomi di Kawasan Asia Tenggara

serta Indo-Pasifik menjadi dorongan bagi Jepang untuk mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia (Suzuki, 2020).

Bantuan luar negeri Jepang seringkali menyimpan berbagai asumsi, baik positif ataupun negatif. Adanya prasangka buruk terhadap bantuan luar negeri Jepang tersebut berasal dari berbagai permasalahan antara Jepang dengan negara-negara di Asia Tenggara. Adanya eksploitasi di masa lampau, penyalahgunaan bisnis, kesenjangan pendapatan, kesenjangan perdagangan, kesenjangan ketergantungan, dan kesenjangan persepsi menjadi permasalahan yang terjadi antara Jepang dan negara-negara di Asia Tenggara. Namun, tidak jarang juga ada yang melihat sisi positif dari bantuan luar negeri Jepang. Banyak negara di Asia Tenggara yang merasa terbantuan dengan kehadiran Jepang di negara mereka. Hal tersebut dikarenakan adanya investasi di sektor industri oleh Jepang. Jepang juga seringkali memiliki peran sebagai pemecah masalah di suatu negara, karena adanya berbagai fasilitas berupa pinjaman (Ichimura, 1980).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebuah pertanyaan, mengapa Jepang bersedia untuk membantu Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan SKPT di enam pulau terluar Indonesia melalui bantuan dana hibah ODA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui latar belakang Jepang memberikan bantuannya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memperkaya ilmu kerja sama pembangunan internasional, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kerja sama antara Jepang dan Indonesia dalam rangka pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam pulau terluar yang ada di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para pembuat kebijakan Indonesia, dalam rangka menyetujui adanya kerja sama pembangunan internasional. Hal ini dikarenakan penelitian berisikan mengenai adanya berbagai motif dibalik kebaikan hati suatu negara kepada negara lainnya melalui pemberian bantuan pembangunan luar negeri yang berbentuk hibah.

2. Memperluas wawasan bagi mahasiswa dalam memahami makna di balik adanya kerja sama pembangunan internasional yang banyak dilakukan oleh berbagai negara.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pemberian bantuan Jepang melalui JICA terhadap pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam pulau terluar Indonesia, pernah dilakukan oleh Irmawati dan Patricia Benedicta. Di dalam penelitiannya, Irmawati dan Patricia Benedicta menyampaikan bahwa ODA sebagai strategi Jepang untuk memperoleh kepentingan nasionalnya. Melalui jurnal tersebut disebutkan bahwa Jepang membutuhkan banyak ketersediaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, namun karena adanya peraturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga memberikan keterbatasan Jepang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (Irmawati dan Patricia Benedicta Watania, 2021a). Selain itu terdapat juga kepentingan ekonomi dan politik Jepang di balik adanya pemberian bantuan pembangunan SKPT Morotai, Maluku Utara. Terdapat persaingan politik antara Jepang dan Tiongkok sehingga hal tersebut membuat Jepang harus memperbaharui dan memperbaiki program bantuan luar negerinya (Wangkey, 2013). Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Patricia Benedicta lebih banyak berisikan mengenai kepentingan nasional Jepang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari adanya tujuan untuk meningkatkan kuantitas ikan ataupun produksi laut lainnya, melalui pemberian hibah ODA kepada Indonesia dalam rangka

pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di wilayah Morotai, Maluku Utara.

Selain penelitian Irmawati dan Patricia Benedicta, penelitian mengenai topik antara Jepang dan Indonesia ini juga pernah diteliti oleh Devi Andriyani dan Try WahyuSyahPutra. Di dalam penelitiannya mereka menyampaikan bahwa Jepang memberikan bantuan kepada Indonesia melalui industri perikanan karena dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat Jepang akan pemenuhan konsumsi (Andriyani, 2021). Ikan tuna merupakan jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jepang membuat pemerintah Jepang harus mencari negara yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya tersebut. Indonesia yang kaya akan potensi perikanan terutama tuna membuat Jepang tertarik untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia. Indonesia bekerja sama dengan Jepang di dalam sektor perikanan karena adanya keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam penelitian ini lebih banyak membahas mengenai adanya kebutuhan Jepang akan ikan tuna dari Indonesia serta adanya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia setelah melakukan ekspor ikan tunanya ke Jepang. Penelitian ini lebih berfokus pada jumlah atau kuantitas ekspor ikan tuna Indonesia serta pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah melakukan ekspor tersebut.

Sedangkan penelitian Gaffar Mu'qaaffi, Amarulla Octavian, Bayu Asih Yulianto, dan Mohammad Alfin Widyanto melihat dari perspektif Indonesia yang menganggap bahwa Jepang merupakan pihak yang membantu Indonesia dalam menghadapi permasalahan Laut Cina Selatan (Mu'qaaffi dan Octavian, 2022).

Pemerintah Indonesia menganggap bahwa bantuan Jepang terhadap pembangunan SKPT terutama di Natuna merupakan salah satu bentuk untuk melepaskan Natuna dari permasalahan Laut Cina Selatan. Dana hibah tersebut diberikan kepada Indonesia untuk melaksanakan berbagai pembangunan. Melalui pembangunan tersebut maka perekonomian di wilayah Natuna akan meningkat dan dapat melawan Tiongkok untuk tidak mengusik perairan Natuna. Penelitian ini lebih berfokus pada usaha Indonesia untuk dapat melawan dan menjaga keamanan maritimnya dari Tiongkok akibat permasalahan Laut Cina Selatan. Indonesia membutuhkan dana yang cukup banyak untuk mengembangkan perekonomian di wilayah Natuna, sedangkan Jepang merupakan negara yang sangat tertarik untuk berinvestasi dalam bidang kelautan dan perikanan.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Dennis D. Trinidad dituliskan bahwa kerja sama Jepang dengan ASEAN melalui pemberian bantuan luar negeri merupakan salah satu strategi Jepang untuk tetap dapat bersaing dengan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok serta kemajuan ekonominya yang mampu memberikan pengaruh ke ke wilayah Laut Cina Selatan serta Asia Tenggara, menjadi alasan Jepang untuk mengembangkan ODA. Selain itu disebutkan juga bahwa ODA Jepang merupakan salah satu cara yang dapat berkontribusi dalam menciptakan perdamaian Dunia. Hal ini dikarenakan ODA Jepang memberikan bantuan terhadap pembangunan kemaritiman di beberapa wilayah yang terlibat dalam permasalahan Laut Cina Selatan (Trinidad, 2018b). Penelitian ini berfokus pada strategi-strategi kerja sama Jepang di dalam program ODA, terlebih Jepang memiliki kekuatan untuk memberikan bantuan dalam bentuk hibah. Selain itu, penelitian ini juga

banyak membahas mengenai hubungan Asia-Pasifik terutama peran bantuan Jepang di kawasan tersebut.

Berdasarkan berbagai penelitian terdapat perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, namun fokus utama dari penelitian-penelitian di atas ialah mengenai motif Jepang dalam memberikan bantuan hibah dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam pulau terluar Indonesia. Terdapat penelitian yang membahas mengenai keinginan Jepang untuk dapat memenuhi kebutuhan akan kualitas dan kuantitas ikan ataupun hasil laut lainnya. Selain itu, ada juga penelitian yang membahas mengenai adanya keterkaitan dengan permasalahan Laut Cina Selatan yang melibatkan Indonesia di dalamnya, serta adanya kepentingan Jepang atas kebangkitan Tiongkok. Terdapat perbedaan antara riset yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu penelitian ini akan berfokus pada adanya kepentingan nasional Jepang terhadap Indonesia yaitu dalam rangka mencegah adanya keberlanjutan pengaruh Tiongkok di Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Teori yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah teori Realisme dalam rangka pemberian bantuan luar negeri. Teori realisme di dalam kerja sama pembangunan internasional terdapat 2 jenis yaitu realisme klasik dan neorealisme. Di dalam teori realisme klasik terdapat salah satu tokoh yaitu Morgenthau yang mengatakan bahwa politik internasional adalah sebuah strategi bagi suatu negara

dalam memperebutkan kekuasaan (Rosyidin, 2020a). Dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari negara adalah mencapai kekuasaan. Menurut Machiavelli, manusia merupakan tokoh yang paling egois, hal ini dikarenakan adanya berbagai kepentingan yang ingin mereka capai (Leiter, 2001). Jika kita melihat teori realisme menurut Machiavelli, kita juga akan melihat politik dari sudut pandang yang berbeda. Di mana pemimpin diajarkan untuk berfokus pada tujuan yang ingin dicapai dan tidak menimbang cara apa yang akan digunakan untuk mencapai berbagai tujuan tersebut. Teori realisme sangat erat kaitannya dengan negara, kepentingan, serta adanya kemungkinan berperang. Serta manusia dianggap sebagai aktor yang memiliki naluri politik dan mampu untuk menimbulkan peperangan (Kirshner, 2012).

Teori realisme klasik yang dikemukakan oleh Morgenthau di dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations*, mengatakan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kekuasaan dan politik (Morgenthau, 1978a). Adanya dominasi perpolitikan yang tinggi serta rendahnya diplomasi mampu menimbulkan berbagai konflik militer, inilah salah satu gambaran dari terjadinya Perang Dunia II serta Perang Dingin menurut teori realisme klasik. Kuatnya permainan politik serta perebutan kekuasaan menurut teori realisme ini ternyata juga memiliki keterkaitan dengan geopolitik. Geopolitik yang terdiri atas letak geografis, daratan dan lautan, jarak, sumber daya, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan lokasi sebuah negara. Berbagai hal tersebut mumpuni untuk dijadikan sebagai kekuatan serta alasan dalam memperebutkan kekuasaan seperti yang diajarkan oleh teori realisme. Geopolitik seringkali dianggap sebagai bagian dari ajaran realisme yang mana

terdapat politik kekuasaan yang manipulatif, hal ini dikarenakan mampu untuk mengguncang kestabilan ekonomi dan perpolitikan (Kelly, 2019).

Teori realisme menurut Morgenthau berisikan fakta serta memberikan makna melalui sebuah alasan. Realis memandang bahwa karakter kebijakan luar negeri dapat dipastikan melalui pemeriksaan tindakan politik serta pertimbangan konsekuensi dari tindakan tersebut. Adanya fakta tersebut mampu melahirkan dugaan mengenai tujuan akan sebuah tindakan dari suatu negara (Morgenthau, 1978b). Realisme memandang bahwa negara merupakan aktor utama dalam politik internasional. Hal tersebut mengantarkan persepsi bahwa setiap kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh suatu negara, berasal dari pemeriksaan tindakan politik serta adanya pertimbangan mengenai untung dan rugi.

Realisme menganggap bahwa melalui geopolitik maka suatu negara dapat mencapai kekuasaan yang mereka inginkan. Banyak negara yang memiliki kekuatan di dalam bidang geopolitik dan mampu untuk memberikan pengaruh kepada negara-negara lainnya. Adanya penyebaran pengaruh dari satu negara ke negara lainnya menimbulkan rasa kekuasaan bagi negara yang memberikan pengaruh tersebut. Teori realis memberikan gambaran dari realitas bagaimana negara membangun hubungan dengan negara lainnya, seringkali hubungan antar negara ini dipercaya sebagai hubungan yang murni terbangun karena adanya rasa kemanusiaan saja. Namun pada kenyataannya ada berbagai kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh para aktor-aktor hubungan internasional, di sini negara merupakan tokoh utama dari hubungan internasional.

Berdasarkan teori realis tersebut, pemberian bantuan pembangunan luar negeri, diyakini dilakukan oleh berbagai negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka (Packeham, 1966). Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga faktor kemanusiaan dalam memberikan bantuan kerja sama pembangunan internasional. Namun faktor kepentingan nasional lah yang menjadi kunci dari berlangsungnya kerja sama dua negara atau lebih dalam rangka pembangunan suatu negara. Suatu negara mau untuk mengeluarkan banyak kekuatannya demi mencapai suatu kekuasaan ataupun berbagai keuntungan atas negara lainnya.

Kerja sama pembangunan internasional diyakini erat kaitannya dengan teori realisme, hal ini dikarenakan adanya keinginan negara pendonor atas hal-hal yang dimiliki oleh negara penerima donor tersebut. Hal tersebut tentunya sesuai dengan penjelasan mengenai teori realisme yang mana negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, serta berusaha untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya. Adanya berbagai kepentingan nasional seperti kepentingan di bidang ekonomi, keamanan, dan kekuasaan menjadi alasan terbesar adanya kerja sama pembangunan internasional. Di samping itu, negara pendonor juga perlu untuk menjaga kestabilan pada negara penerima donor dengan cara meningkatkan kepuasan masyarakat serta meningkatkan keterampilan mereka agar tidak menimbulkan konflik di dalam negara tersebut akibat adanya kerja sama pembangunan (Belle, 2004). Dewasa ini banyak negara-negara berkembang yang berubah menjadi negara pemberi bantuan atau donor yang pada awalnya hanyalah negara penerima donor. Jepang dan Tiongkok merupakan salah satu contoh dari negara kuat di Kawasan Asia yang menjelma menjadi negara pemberi bantuan

pembangunan internasional di berbagai negara di Kawasan Asia atau bahkan Kawasan Afrika.

Bantuan luar negeri menurut realis merupakan sebuah kerja sama yang tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Realisme justru tidak akan memberikan kesempatan kepada negara penerima donor untuk melakukan pembangunan ekonominya, melainkan hanya dijadikan lahan untuk mencapai kekuatan dan supremasi. Efektivitas bantuan luar negeri menurut realis akan terlihat dari tingkat royalti negara penerima donor kepada negara pemberi donor (Ryantori, 2014). Realis menilai bahwa bantuan luar negeri merupakan alat untuk menghimpun aliansi yang mana nantinya digunakan untuk mencapai kepentingan nasional negara pemberi donor. Hal tersebut terbukti sejak masa Perang Dingin, di mana negara-negara yang menjadi aktor utama dalam perang dingin saling mengeluarkan kekuatannya dalam bidang ekonomi untuk membantu negara lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Inilah yang juga terjadi di masa modern saat ini, di mana realis percaya bahwa negara memberikan bantuan luar negeri semata-mata hanya untuk kepentingan nasionalnya saja.

Beberapa bantuan luar negeri memang memiliki motif kemanusiaan, namun realis tetap melihat adanya kekuatan yang mendominasi dari negara pemberi donor. Realis percaya bahwa bantuan yang berdasarkan kemanusiaan sifatnya sangat lemah untuk berjalan dalam jangka waktu yang lama, hal ini dikarenakan adanya berbagai tujuan yang diinginkan oleh para negara donor terhadap negara penerima donor tersebut (Schlesinger, 1959). Setiap bantuan luar negeri tentu terdapat peran politik di dalamnya, inilah yang membuat realis semakin yakin bahwa bantuan luar

negeri tidak ada yang bersifat gratis atau bahkan berdasarkan kemanusiaan. Pasti terdapat berbagai keuntungan yang diinginkan oleh para pemberi donor, baik untuk di masa kini atau masa yang akan datang. Realis juga mempertimbangkan kepada siapa bantuan luar negeri akan diberikan seperti berbagai aspek peluang perkembangan ekonomi, lokasi, serta kekuatan militer penerima donor.

Menurut Hans Morgenthau terdapat enam jenis bantuan luar negeri seperti *humanitarian foreign aid*, *subsistence foreign aid*, *bribery*, *military foreign aid*, *prestige foreign aid*, dan *foreign aid for economic development*. *Bribery* atau penyuapan merupakan tindakan penyuapan kepada pemerintah lainnya melalui pemberian bantuan luar negeri. Salah satu tujuan yang diinginkan oleh negara pemberi bantuan adalah keunggulan politik, sedangkan bagi negara penerimanya yaitu pertumbuhan ekonomi. Hans juga menyebutkan bahwa bantuan luar negeri jenis ini akan berbentuk transfer uang ataupun jasa kepada pemerintah. *Bribery* atau penyuapan memiliki tujuan yang cukup sama dengan *prestige foreign aid*, yaitu untuk mendapatkan keuntungan di dalam bidang politik. Namun *prestige* merupakan bantuan yang lebih cenderung ke arah militer dan ekonomi (Morgenthau, 1962a). *Prestige* memiliki kemiripan dengan *foreign aid for economic development*, yang mana *foreign aid for economic development* juga berfokus pada pembangunan ekonomi di negara penerima donor. Namun, bantuan luar negeri jenis ini sangat terlihat dijadikan sebagai senjata politik daripada sebuah bantuan yang menjanjikan di masa depan.

Penulis menggunakan teori realisme di dalam penelitiannya karena melihat adanya dominasi negara sebagai tokoh utama dalam kerja sama antara Indonesia

dan Jepang. Teori realis mengajarkan akan adanya untung dan rugi di dalam sebuah kerja sama antar negara. Jepang memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia karena adanya pertimbangan untung dan rugi. ODA Jepang menjadi sebuah alat komunikasi pemerintah Jepang (Tsunoda, 1998). Selain itu, ODA juga digunakan sebagai alat diplomasi serta pendorong investasi oleh Pemerintah Jepang. Keberadaan ODA Jepang di Indonesia sangat mendukung berbagai perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Hal tersebut lah yang membuat Jepang terus meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Indonesia melalui ODA (Rudner, 1989a).

Jepang memberikan fokus terhadap Asia Tenggara dan Afrika dalam pemberian bantuan luar negeri melalui ODA, terutama Indonesia. Indonesia memiliki letak yang strategis sebagai jalur transportasi berbagai sumber daya energi. Selain itu, Jepang juga menggunakan Indonesia sebagai pasar berbagai barang atau pengusaha Jepang yang ingin merelokasi perusahaannya. Jepang menggunakan keuntungan-keuntungan tersebut sebagai pertimbangan akan strategi ODA di Indonesia (Rudner, 1989b).

1.7 Operasional Konsep

1.7.1 Bantuan luar negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu program yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu perkembangan dari negara berkembang atau bahkan negara terbelakang. Bantuan luar negeri seringkali

diartikan sebagai alat pendukung perpolitikan internasional. Terdapat 2 kelompok yang memiliki pandangannya masing-masing terhadap bantuan luar negeri, ada yang mendukung kebijakan tersebut serta ada pula yang melihatnya sebagai sebuah bentuk ancaman yang diberikan oleh negara kuat kepada negara yang lebih lemah (Morgentahu, 1962). Menurut para penganut Liberalis, bantuan luar negeri merupakan seperangkat program atau langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan sosial ekonomi dan perpolitikan negara penerimanya (Hattori, 2021). Semakin berkembangnya zaman, tidak hanya negara maju saja yang dapat memberikan bantuan luar negerinya tetapi negara berkembang juga sudah banyak yang mampu untuk membantu sesamanya. Bantuan luar negeri bermula pada saat terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mana dijadikan alat untuk mendapatkan aliansi serta dukungan untuk bisa menjadi negara yang paling kuat saat itu.

1.7.2 Sphere of Influence

Sphere of Influence adalah sebuah wilayah yang secara tidak langsung menjadi sebuah kawasan penyebaran pengaruh dari suatu negara dalam skala yang cukup besar. Biasanya kekuatan suatu negara dalam pemberian pengaruh ini dilandasi adanya kekuatan militer serta ekonomi yang mereka miliki (Mathisen, 1973). Terkadang *sphere of influence* ini dapat memberikan pengaruh yang cukup dominan serta dapat membatasi kemerdekaan suatu wilayah (Keal, 1983). Salah satu contoh dalam *sphere*

of influence yaitu ketika pasca Perang Dunia II yang mana Uni Soviet berusaha untuk memberikan pengaruhnya kepada Eropa Timur serta Amerika Serikat yang menyebarkan pengaruhnya kepada Amerika Tengah. *Sphere of influence* ini juga sangat erat kaitannya dengan adanya pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara yang sedang melakukan pembangunan di dalam negerinya ataupun kegiatan investasi di suatu negara.

1.7.3 Hibah

Hibah adalah sebuah pemberian secara sukarela yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan yang harus diberikan kepada pihak pemberi tersebut (Mustamam, 2013). Pemberian hibah adalah salah satu instrumen dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional, namun tindakan pemberian hibah ini tidak banyak dilakukan oleh berbagai negara. Hal ini dikarenakan adanya setiap tujuan-tujuan tertentu dari berbagai bantuan yang diberikan oleh negara pendonor kepada negara penerima. Salah satu contoh dari pemberian bantuan luar negeri yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah pemberian hibah kepada Myanmar melalui Sekretariat ASEAN dalam rangka penyelesaian permasalahan Rakhine State (Negeri, 2019).

Pemberian bantuan hibah dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh suatu negara tanpa mengharapkan adanya imbalan, hal ini cukup berbeda dengan bantuan luar negeri dalam bentuk

utang. Bantuan luar negeri yang paling sering dijumpai adalah yang berbentuk utang, yang mana nantinya negara penerima harus mengembalikan dana bantuan tersebut kepada negara pendonor. Dalam penelitian ini antara Indonesia dan Jepang terlibat dalam bantuan luar negeri yang berbentuk hibah, Jepang sebagai negara pendonor dan Indonesia adalah sebagai negara penerimanya. Dana bantuan tersebut akan digunakan dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam pulau terluar di Indonesia. Bantuan hibah tersebut memberikan makna bahwa Indonesia tidak diharuskan untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh Jepang tersebut.

1.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penulis akan bantuan hibah ini yaitu adanya kepentingan nasional yang diinginkan Jepang dari Indonesia, salah satunya adalah adanya keterkaitan hubungan antara Jepang dan Tiongkok. Bantuan hibah ini ditafsirkan sebagai upaya Jepang dalam merangkul Indonesia untuk membendung pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, terutama di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Jepang agar tidak mengalami kekalahan kekuatan di Kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik tersebut.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk memahami atau menafsirkan makna suatu peristiwa atau interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai penelitian yang sudah dilakukan. Hasil dari metode penelitian kualitatif akan menekankan pada makna yang terkandung, sehingga tidak hanya menghasilkan generalisasi data yang tersedia saja.

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan mengenai fenomena ataupun hal-hal yang dijadikan sebagai penelitian. Tipe eksplanatif juga menjelaskan mengenai mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa pengaruhnya bagi bidang lainnya. Sehingga tipe eksplanatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berusaha untuk menjelaskan alasan mengenai suatu peristiwa atau permasalahan yang diteliti dapat terjadi (Glory, 2020).

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat atau lokasi-lokasi yang dapat memuat info mengenai informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Situs penelitian

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Perpustakaan Universitas Diponegoro serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kedua situs penelitian tersebut digunakan oleh penulis untuk melakukan studi kepustakaan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu atribut, sifat, bahkan penilaian orang lain mengenai suatu topik penelitian (C. Tanujaya, 2017). Contoh dari subjek penelitian adalah perusahaan, pemimpin, ataupun pakar SOP. Subjek penelitian di dalam penelitian ini ialah Jepang yang diwakilkan oleh JICA (*Japan International Cooperation Agency*).

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks ataupun video yang memuat mengenai bantuan Jepang terhadap pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan terpadu (SKPT) di enam pulau terluar Indonesia.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data terdiri dari 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan, bisa dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak ataupun melaksanakan observasi secara langsung ke tempat penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi pustaka.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber yang diperoleh dari jurnal, buku, ataupun website yang terpercaya. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari berbagai media yang memuat informasi mengenai bantuan Jepang dalam pembangunan SKPT di Indonesia, serta persaingan antara Jepang dan Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan metode yang berbasis internet. Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari bahan pustaka atau sekunder. Contoh dari teknik kepustakaan ini terdiri dari pencarian informasi melalui dokumen tertulis, gambar, ataupun yang berbentuk elektronik. Sedangkan metode berbasis internet adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari internet. Seperti *website* jurnal yaitu Jstor, Scopus, Google Scholar, Taylor & Francis. Selain adanya *website* jurnal juga terdapat *website* kenegaraan seperti laman resmi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

1.9.7 Kualitas Data

Kualitas data yang digunakan di dalam penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini disebabkan karena bersumber dari media yang terpercaya. Jurnal yang digunakan juga merupakan jurnal yang berasal

dari *platform* yang terpercaya seperti Jstor, Scopus, Google Scholar, Taylor & Francis. Selain jurnal, sumber penelitian ini juga berasal dari berbagai *website* resmi pemerintah Indonesia seperti laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.